

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara politis tekad pemerintah untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat terlihat cukup besar. Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, bahkan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan untuk itu pemerintah bertanggung jawab membiayainya. Melalui perubahan Pasal 31 UUD 1945, tekad tersebut makin diperkuat dengan adanya ketetapan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Prosentase yang sama juga dimandatkan untuk dialokasikan oleh setiap daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing.

Usaha pemerintah membangun pelayanan pendidikan terlihat juga melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat peraturan perundangannya. Langkah-langkah-langkah itu dilakukan seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang diatur Undang-undang (UU) nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah. Salah satu langkah dimaksud adalah pengesahan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dilakukan pemerintah setelah melalui proses dan polemik panjang. Pertimbangan terhadap keberadaan politik otonomi daerah cukup tercermin

dalam UU no. 20 Tahun 2003 ini. Pada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah di sektor pendidikan, misalnya, kata “pemerintah’ (pusat) selalu berdampingan dengan kata “pemerintah daerah”. UU ini juga mengatur tanggung jawab pengelolaan pendidikan berdasarkan tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 50).

Dalam praktiknya tekad untuk membangun pendidikan tersebut dihadapkan pada berbagai masalah, sehingga jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk mendapat dan mengikuti pendidikan masih belum memadai. Secara umum saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, sebagaimana disebut berikut.

1. Rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik antar wilayah, antar tingkat pendapatan penduduk, maupun antar gender;
2. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, antara lain karena kurikulum yang tidak terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, serta terbatasnya sarana, dan prasarana pendidikan; dan
3. Lemahnya manajemen penyelenggara pendidikan, baik di lembaga formal maupun informal (Toyaman dan Usman, 2004: 1).

Penjabaran tekad untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima ke dalam perencanaan yang lebih teknis dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004,

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Program Pembangunan Nasional Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2000-2004. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan. Dengan harapan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Renstra tersebut dijabarkan kembali ke dalam Renstra Daerah (Renstrada) dengan mempertimbangkan Pola Dasar (Poldas) Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Kompas dalam Toyaman dan Usman (2004: 2).

Dalam rangka melaksanakan tujuan pendidikan nasional secara nyata maka sangat diperlukan adanya penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai baik dari sudut perangkat lunak (misalnya kurikulum), serta perangkat keras (misalnya alat peraga, buku laporan, peralatan laboratorium, dan sebagainya) maupun prasarana pendidikan dalam hal ini baik fisik maupun non fisik. Secara keseluruhan pengadaan fasilitas pendidikan termaksud tentunya dapat dipenuhi dengan adanya sumber pembiayaan, dengan kata lain pembiayaan merupakan kunci utama dalam rangka menyukseskan pencapaian tujuan pendidikan nasional (Depdiknas, 1998: 66)

Perumusan program pembangunan bidang pendidikan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan pemerintah. Selama ini kekurangan atau keterbatasan dana menjadi alasan klasik dari lambatnya kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Namun banyak pihak berpendapat bahwa keterbatasan anggaran seharusnya tidak

selalu dijadikan alasan. Hal yang lebih penting adalah perlu adanya ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah untuk melaksanakan berbagai keputusan politik di bidang pendidikan bekerja ‘asal-asalan’ dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya lemah, maka berapapun anggaran yang tersedia tidak menjamin keberhasilan dan berkelanjutan pembangunan pendidikan.

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam dunia pendidikan sangat besar antara lain terlihat dari banyaknya jumlah sekolah dasar (SD), murid SD dan guru, terutama di sekolah-sekolah Negeri yang harus dibiayai pemerintah. Pada tahun 2000/2001, jumlah SD lengkap mencapai 148.964 buah, sebanyak 138.751 buah (93%) diantaranya berstatus SD Negeri. Demikian pula jika dilihat dari jumlah murid berdasarkan status sekolah, pada tahun 1999/2000 sekitar 24 juta murid (93%) bersekolah di SD Negeri. Sementara itu jumlah guru SD (termasuk kepala sekolah) berdasarkan data tahun ajaran 2000/2001, yang berstatus sebagai PNS mencapai lebih dari 93 % dari total guru dan kepala sekolah (1.128.475 orang) atau lebih dari 25 % dari total PNS Indonesia (Anonim, 2001).

Persoalan pendidikan secara nasional sebagaimana digambarkan di atas muncul juga di tingkat daerah. Kemampuan dan tekad pemerintah daerah (pemda) yang saat ini juga masih menghadapi banyak hambatan. SDM pengelola pendidikan di banyak daerah dinilai belum sepenuhnya siap, kebanyakan mereka masih berada pada taraf sebagai pelaksana saja. Keadaan ini dipersulit oleh terbatasnya anggaran, sehingga untuk beberapa

tahun ke depan pengelolaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia diperkirakan belum akan mengalami perbaikan yang berarti.

Biaya pendidikan tidak dapat disamakan dengan pengeluaran uang oleh lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan sekolah. Lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan sekolah boleh saja mengeluarkan uang melebihi kebutuhan yang seharusnya untuk menyelenggarakan pembelajaran. Bahkan kondisi tersebutlah yang biasa terjadi pada berbagai dinas pendidikan, lembaga pendidikan dan sekolah yang ada di tanah air (Harsono, 2007: 9).

Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggara pendidikan (Harsono, 2007: 9). Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapatlah disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah. Lembaga pendidikan yang boros apabila mengeluarkan dana operasional, dana pengembangan, dana kesiswaan, dan dana lain melebihi dana yang seharusnya diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan pada unit kerjanya.

Menurut sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis 1) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 2) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, 3) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, dan 4) lembaga pendidikan itu sendiri. Ketika zaman ini makin maju, penduduk makin padat, para penyelenggara pendidikan tidak mampu lagi membiayai pendidikan yang diselenggarakan, maka beban biaya pendidikan itu

dipindahkan kepada masyarakat, pemerintah, bahkan dinatur lain (Harsono, 2007: 9-10).

Sekarang ini muncul kritik akan mahalnya biaya pendidikan. Banyak anggot masyarakat yang menolak biaya pendidikan, biaya pendidikan dikatakan sebagai sesuatu yang mahal. Sejak dulu biaya pendidikan akademis tidak pernah murah. Yang membuat biaya pendidikan terlihat tinggi karena dibandingkan dengan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia. Anehnya, beberapa komponen masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi menolak pembiayaan pendidikan yang murah, indikatornya mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri, yang notabene biaya pendidikan yang harus dipikul lebih mahal. Biaya pendidikan yang mahal itu dijadikan indikator prestise bagi mereka (Harsono, 2007: 10).

Otonomi daerah saat ini sedang bergulir sebagai konsekuensi tuntutan reformasi yang dimulai tahun 1998 telah ditampung dalam UU No. 22 tahun 1999 dan telah resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. sebagai pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu diundangkannya UU No 25 tahun 1999. kedua Undang-undang ini lah yang mengakibatkan perubahan paradigma manajemen keuangan daerah. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Bagaimana pengelolaan itu harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dikeluarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Perubahan ini juga berdampak pada perubahan manajemen keuangan pendidikan.

Dalam skala mikro, manajemen keuangan dapat meningkatkan nilai organisasi. Namun, di skala makro, manajemen keuangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara. Manajemen keuangan pendidikan tidak hanya membahas mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk proses pendidikan, namun, juga membahas mengenai berbagai persoalan (resiko) yang terkait dengan pengelolaan keuangan, serta berbagai upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelangsungan organisasi (Bastian, 2007: 3).

Pengelolaan biaya/keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam pemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan Pengelolaan biaya/keuangan dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan biaya/keuangan juga ditentukan oleh bagaimana pengguna biaya/keuangan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan biaya/keuangan yang tepat dan cepat, bukanlah tugas yang mudah bagi Depdiknas yang memiliki skala organisasi yang besar, sebaran geografis yang luas dan kewenangan perbendaharaan yang terdesentralisasi dengan jumlah kantor/satuan kerja yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah satker dan anggaran yang besar tersebut, memerlukan sistem pengelolaan biaya/keuangan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran organisasi setiap satuan kerja secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan biaya pendidikan di Dinas pendidikan Kota Magelang, mengingat Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Karakteristik Pengelolaan Biaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang “. Fokus tersebut dijabarkan menjadi tiga yaitu.

1. Bagaimana karakteristik sumber dana di Dinas Pendidikan Kota magelang?
2. Bagaimana karakteristik alokasi dan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang?
3. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga.

1. Mendeskripsikan karakteristik sumber dana di Dinas Pendidikan Kota magelang.
2. Mendeskripsikan karakteristik alokasi dan penggunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang.

3. Mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban dana pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Bagi dinas pendidikan Kota Magelang, hasil penelitian ini sebagai wacana teoretis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengelolaan Biaya Pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat merupakan sumbangsih pemikiran dan pengembangan ilmu sosial dalam rangka untuk memajukan bangsa demi tercapinya tujuan pendidikan nasional

b. Bagi penulis

Sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya dalam lapangan.

c. Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

E. Daftar Istilah

1. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggara pendidikan

2. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

3. Sumber Dana

Sumber dana merupakan ketersediaan sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggara pendidikan

4. Alokasi dan Penggunaan Dana

Pertanggung jawaban dana pendidikan adalah kegiatan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan

5. Pertanggungjawaban Dana

Pertanggung jawaban dana pendidikan adalah kegiatan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan